

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Kajian Pustaka**

##### **1. Nilai-Nilai Keislaman dalam Kabupaten Kudus**

Kabupaten Kudus merupakan salah satu Kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Tengah erat akan kebudayaan serta sejarah-sejarahnya. Khususnya dalam hal nilai-nilai keislaman yang terkandung dalam setiap kebudayaannya. Mulai dari perilaku manusianya, tradisi-tradisinya, peninggalan sejarahnya, dan masih banyak lagi. Nilai-nilai yang menjadi ruh bagi setiap masyarakatnya yakni nilai-nilai bagus, ngaji dan dagang (GUSJIGANG). Hal tersebut bermaksud bahwa sebagai masyarakat senantiasa menanamkan pada dirinya akhlak yang baik, senantiasa mencari ilmu dan memperdalam ilmu agama, serta melakukan kegiatan wirausaha.

Gusjigang merupakan nilai-nilai kearifan local masyarakat yang mempunyai arti sebagaimana berikut:

- 1) Toleransi antar masyarakat, seperti halnya tercermin dalam budaya local Kudus yang menghindari makanan daging sapi. Hal ini merupakan upaya masyarakat Kudus untuk menghormati penganut hindu. Sebagaimana yang telah diajarkan oleh Sunan Kudus pada masa itu.
- 2) Upaya untuk mencari ilmu sepanjang hayat. Hal ini sebagaimana julukan bahwa kudus merupakan kota santri. Terlihat dari banyaknya Lembaga Pendidikan yang ada. Mulai sekolah dasar hingga Universitas. Selain itu juga banyaknya Lembaga yang berbasis

- keagamaan seperti pondok pesantren, serta Pendidikan non formal lainnya.
- 3) Kudus merupakan kota wirausaha yang didalamnya tercermin nilai-nilai kerja keras dan pantang menyerah oleh masyarakat yang berdomisili di Kudus.<sup>1</sup>

Berdasarkan beberapa uraian di atas bahaw segala aktivitas-aktivitas masyarakat di Kabupaten Kudus teidak terlepas dari nilai-nilai keagamaan. Masyarakat Kabupaten Kudus sangatlah menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan dalam segala aspek kehidupannya. Hal ini juga terjadi pada aspek pemerintahan Kabupaten Kudus. Baik masyarakatnya maupaun petinggi-petingginya juga menjalankan nilai-nilai gusjigang tersebut. Juga mayoritas masyarakat Kabupaten Kudus yang memeluk agama Islam.

## **2. Pendapatan Asli Daerah**

### **a. Pengertian Pendapatan Hasil Daerah (PAD)**

Pendapatan asli daerah (PAD) menurut Kuncoro yakni merupakan penerimaan pendapatan suatu daerah yang berasal dari hasil pajak daerah, usaha-usaha milik daerah, kekayaan daerah yang dipisahkan, serta pendapatan lainnya yang sah.<sup>2</sup> Semakin tinggi PAD yang diperoleh yang diperoleh suatu daerah makan semakin tinggi pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Hal ini sejalan dengan Mardiasmo

---

<sup>1</sup> Nuskhan Abid, Mengintegrasikan Kearifan Lokal Gusjigang Dan Nilai-Nilai Soft Skill Dalam Proses Pembelajaran, *ELEMENTARY*, vol. 5 no. 2, 2017, h. 180.

<sup>2</sup> Kuncoro Mudrajat, Otonomi dan Pembangunan Daerah, Erlangga, Yogyakarta, 2006, h.497

bahwa pertumbuhan PAD berkelanjutan akan menyebabkan peningkatan pertumbuhan ekonomi, namun eksploitasi PAD akan membebani masyarakat dan mengancam perekonomian secara makro.<sup>3</sup>

Konsep lain terkait PAD bahwa PAD merupakan pendapatan yang diperoleh berasal dari sumber-sumber tertentu seperti pajak daerah, retribusi daerah, laba perusahaan daerah, dan lain – lain yang sah. Selain itu PAD juga merupakan salah satu sumber pembiayaan suatu daerah yang dihasilkan melalui pajak daerah, perusahaan milik daerah, pengelolaan kekayaan milik daerah, serta lainnya yang sah.<sup>4</sup>

Definisi lain PAD yakni arus kas masuk yang diterima suatu daerah yang berasal dari sumber-sumber tertentu (pajak daerah, retribusi daerah, usaha milik negara, pengelolaan kekayaan milik daerah, serta pendapatan lainnya yang sah yang diatur oleh peraturan yang berlaku.<sup>5</sup> Sebagaimana Pasal 1 ayat 18 UU No. 3 Tahun 2004 bahwa PAD merupakan pendapatan daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah tersebut. Juga Pasal 3 ayat 1 yang menyebutkan bahwa PAD memiliki tujuan untuk memberikan suatu kewenangan pada pemerintah daerah untuk

---

<sup>3</sup> Mardiasmo, Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah, Andi Offset, Yogyakarta, 2004, h.87.

<sup>4</sup> Carunia Mulya Firdausy, Kebijakan dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dalam Pembangunan Nasional, (Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta 2018) h. 21

<sup>5</sup> Carunia Mulya Firdausy, Kebijakan dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dalam Pembangunan Nasional, (Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta 2018) h. 22

membiayai suksesnya otonomi daerah dengan mengembangkan potensi daerah sebagai bentuk desentralisasi.<sup>6</sup>

**b. Teori Pendapatan Asli Daerah**

Kuncoro yakni merupakan penerimaan pendapatan suatu daerah yang berasal dari hasil pajak daerah, usaha-usaha milik daerah, kekayaan daerah yang dipisahkan, serta pendapatan lainnya yang sah.<sup>7</sup> Besarnya penerimaan PAD oleh suatu daerah, maka besar pula pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. Sebagaimana sejalan dengan Mardiasmo bahwa kenaikan PAD secara konsisten akan menyebabkan kenaikan pertumbuhan ekonomi pula, namun eksploitasi PAD akan berdampak buruk bagi masyarakat maupun perekonomian daerah.<sup>8</sup>

Komponen pembentuk PAD yakni pajak daerah, retribusi daerah, usaha milik negara, pengelolaan kekayaan milik daerah, serta pendapatan lainnya yang sah. Khususnya komponen pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana Prof. Carunia Mulya Firdausy bahwa komponen komponen pajak daerah dan retribusi daerah memiliki pengaruh yang signifikan dalam peningkatan arus masuk kas daerah serta perlunya pemberdayaan potensi-potensi sumber-sumber penerimaan

---

<sup>6</sup> Carunia Mulya Firdausy, *Kebijakan dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dalam Pembangunan Nasional*, (Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta 2018) h. 22

<sup>7</sup> Kuncoro Mudrajat, *Otonomi dan Pembangunan Daerah*, Erlangga, Yogyakarta, 2006, h.497

<sup>8</sup> Mardiasmo, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Andi Offset, Yogyakarta, 2004, h.87.

sehingga bisa menjadi investasi yang lebih baik lagi.<sup>9</sup>

Konsistensi perkembangan PAD suatu daerah sangat bervariasi sesuai dengan komponen pembentuk-pembentuknya serta lingkungan daerah tersebut. Penelitian Prof. Carunia Mulya Firdausy menyatakan bahwa Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, dan Kota Bandung memiliki pertumbuhan perekonomian yang berbeda-beda. Kabupaten Bogor dan Bekasi terjadi pertumbuhan yang signifikan dalam industrinya dengan PDRB mayoritas berasal dari industri pengolahan. Sedangkan Kota Bandung paling banyak berasal dari hotel, restoran, dan industri pengolahan.<sup>10</sup>

PAD sebagai pendorong utama dalam pembangunan daerah sesuai dengan karakteristik masing-masing daerah. Juga potensi-potensi daerah dengan memberdayakannya akan mengembangkan pertumbuhan ekonominya. Kewenangan daerah mengembangkan dan berinvestasi pada sektor-sektor unggulan akan mendorong struktur ekonomi dan kebijakan belanja modal yang tepat sasaran. Dengan begitu dapat memberikan korelasi positif dengan PDRB dan belanja modal juga

---

<sup>9</sup> Carunia Mulya Firdausy, *Kebijakan dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam Pembangunan Nasional*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2018, h.59.

<sup>10</sup> Carunia Mulya Firdausy, *Kebijakan dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam Pembangunan Nasional*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2018, h.5 62-63.

pertumbuhan ekonomi dan tujuan pembangunan regional lainnya.<sup>11</sup>

**c. Sumber Pendapatan Asli Daerah**

Berikut disebutkan beberapa sumber Pendapatan Asli Daerah adalah sebagai berikut:<sup>12</sup>

1) Pendapatan Asli daerah Sendiri yang sah:

a) Hasil Pajak Daerah

Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan RI menyatakan bahwa Pemasukan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah akan digunakan untuk mendanai belanja daerah termasuk belanja modal. Belanja modal ini mekasudnya sebagai modal seperti aset fisik yang meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jaringan, serta dalam bentuk fisik lainnya.<sup>13</sup>

b) Hasil Retribusi Daerah

Koswara menyatakan bahwa retribusi daerah merupakan manfaat yang diperoleh oleh individu maupun badan atau jasa layanan, pekerjaan, pemakaian

---

<sup>11</sup> Carunia Mulya Firdausy, Kebijakan dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam Pembangunan Nasional, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2018, h.66.

<sup>12</sup> M.Zahari MS, Pengaruh Pajak Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sarolangun , No 2.2016 h. 135.

<sup>13</sup> Ramlan, dkk. Pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, dan dana Alokasi khusus terhadap belanja modal (studi pada pemerintah kabupaten/kota di provinsi aceh), Jurnal Magister Akuntansi No 2.2016 h.82

barang, atau izin yang diberikan oleh pemerintah daerah. Besarnya retribusi daerah maka besar pula pemasukan yang dialokasikan dalam pembiayaan sarana dan prasarana publik. Dampaknya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

- c) Hasil Perusahaan milik Daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan
  - d) Lain-lain Pendapatan daerah yang sah.
- 2) Pendapatan berasal dari pemberian Pemerintah yang terdiri dari kontribusi dari pemerintah, kontribusi lain yang diatur oleh peraturan, serta pendapatan lainnya yang sah.

**d. Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah**

Peningkatan Pendapatan daerah dilaksanakan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Intensifikasi, melalui upaya:
  - a) Pendapatan dan peremajaan objek dan subjek pajak dan retribusi daerah.
  - b) Mempelajari kembali pajak daerah yang dipangkas guna mencari kemungkinan untuk dialihkan menjadi retribusi.
  - c) Mengintensifikasi penerimaan retribusi daerah yang ada.

- d) Memperbaiki prasarana dan sarana pungutan yang belum memadai.<sup>14</sup>
- 2) Penggalian sumber-sumber penerimaan baru (ekstensifikasi). Penggalian sumber-sumber pendapatan daerah dilaksanakan untuk menekan biaya. Sebab tujuan upaya ini yakni untuk mengembangkan kegiatan perekonomian masyarakat. Dengan demikian, upaya ekstensifikasi mengacu pada usaha untuk menggali potensi daerah yang nantinya bisa dimanfaatkan secara konsisten.<sup>15</sup>
- 3) Peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Kegiatan ini dengan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat juga kegiatan patuh dalam membayar pajak oleh masyarakat. Kegiatan tersebut merupakan suatu kewajiban dan hak yang selayaknya dilakukan oleh masyarakat kepada negara. Untuk itu perlu dikaji kembali pengertian wujud layanan yang bagaimana yang dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> M. Zahari MS, Pengaruh Pajak Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sarolangun, No.2 2016, h. 135.

<sup>15</sup> M. Zahari MS, Pengaruh Pajak Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sarolangun, No.2 2016, h. 135.

<sup>16</sup> M. Zahari MS, Pengaruh Pajak Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sarolangun, No.2 2016, h. 135.



#### e. **Faktor Penyebab Rendahnya PAD**

Berikut ini dijelaskan mengenai beberapa penyebab rendahnya PAD:<sup>17</sup>

- 1) Kurangnya partisipasi perusahaan perusahaan milik daerah yang menjadi salah satu komponen PAD.
- 2) Terlalu meninggikan sentralisasi dalam perpajakan, karena semua jenis pajak utama yang paling produktif, baik pajak langsung maupun tidak langsung di tarik oleh pusat.
- 3) Meskipun beragamnya pajak daerah, namun tidak semua pajak daerah bisa meningkatkan PAD.
- 4) Banyak orang yang mengkhawatirkan jika suatu daerah memiliki PAD yang tinggi maka mendorong disintegrasi dan separatisme.
- 5) Kelemahan dalam pemberian subsidi pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang memberikan kewenangan yang lebih kecil kepada pemerintah daerah untuk merencanakan pembangunan di daerahnya.

Selain faktor-faktor di atas berikut pendapat lain mengenai faktor yang mempengaruhi rendahnya penerimaan PAD antara lain adalah:

- 1) Melimpahnya sumber pendapatan suatu daerah, namun dikelola oleh instansi yang lebih tinggi.
- 2) Hasil keuntungan Badan usaha milik daerah (BUMD) kebanyakan diberikan pada pemerintah daerah.

---

<sup>17</sup> Carunia Mulya Firdausy, Kebijakan dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dalam Pembangunan Nasional, (Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta 2018) h. 25

- 3) Rendahnya kesadaran membayar pajak, redistribusi, dan lain lainnya oleh masyarakat suatu daerah tersebut.
- 4) Terjadi beberapa kebocoran pendapatan
- 5) Pemungutan biaya yang relative tinggi
- 6) Kurang efektifnya peraturan daerah, sehingga perlu dilakukan perbaikan.
- 7) Kemampuan masyarakat dalam membayar pajak yang cukup rendah.

### 3. Kependudukan

Menurut Badan Pusat Statistik penduduk adalah masyarakat yang bertempat tinggal pada wilayah geografis suatu daerah dalam kurun waktu enam bulan atau lebih dan atau masyarakat yang bertujuan untuk menetap. Sedangkan jumlah penduduk adalah banyaknya masyarakat yang bedomisili pada suatu daerah. Tingginya jumlah penduduk maka tinggi pula kegiatan ekonominya. Sehingga jumlah permintaan barang dan jasa ikut mengalami kenaikan. Akibatnya akan muncul usaha-usaha lain yang akan meningkatkan jumlah PAD. Meningkatnya pendapatan masyarakat akan meningkatkan PAD yang bersumber dari pajak usaha dan pajak perorangan.<sup>18</sup>

Adanya penduduk akan menimbulkan upaya pembangunan. Sebab keduanya memiliki keterkaitan yang kuat. Tanpa penduduk tidak akan terjadi pembangunan, juga tanpa pembangunan maka penduduk tersebut tidak akan mengalami kemajuan. Kira-kira per tahunnya terjadi kelahiran penduduk baru

---

<sup>18</sup> Idham Nur Iman, dkk. Pengaruh Jumlah Penduduk, PDRB dan Belanja Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Bandung Tahun 2000-2017, No.2 2019. h.388

sebesar 89 juta. Penduduk dunia diperkirakan akan meningkat menjadi 8,1 Triliun pada tahun 2025 dan 9,6 Triliun pada tahun 2050 (World Population Report, 2015). Tidari dan C.smith mengemukakan bahwa meledaknya pertumbuhan penduduk akan menyebabkan kemiskinan, gizi dan kesehatan yang buruk, kehidupan rendah, degradasi lingkungan dan beberapa masalah social lainnya. Sebagian besar pertumbuhan ini akan berlangsung di negara sedang berkembang.<sup>19</sup>

Adapun indikator kependudukan sesuai dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kudus diketahui meliputi jenis kelamin penduduk, kelompok umur penduduk, jumlah rumah tangga dan anggota rumah tangga, menurut desa atau kelurahan pada tiap kecamatan, banyaknya penduduk berumur 15 tahun menurut kegiatan utama, serta angka kelahiran dan kematian.<sup>20</sup> Adapun dalam penelitian ini menggunakan data dari BPS Kabupaten Kudus berdasarkan indikator jenis kelamin.

#### 4. Investasi

##### a. Investasi menurut pandangan islam

Kegiatan investasi merupakan kegiatan mengeluarkan atau membelajakan untuk membeli suatu barang-barang yang bisa ditetapkan sebagai modal dan perlengkapan - perlengkapan untuk menambah kemampuan memproduksi

---

<sup>19</sup> Ery Jayanti, Hubungan Pertumbuhan Penduduk dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Sumatera, Jurnal Ekonomi dan Kkebijakan Publik Indonesia, No.2, 2017, h. 137

<sup>20</sup> Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kudus, <https://kuduskab.bps.go.id/subject/12/kependudukan.html#subjekViewTab3>

barang dan jasa.<sup>21</sup> Investasi merupakan hal yang dianjurkan oleh agama islam, sebagaimana ayat berikut yang merupakan seruan untuk berinvestasi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلَسَنَظُرُ نَفْسًا  
مَّا قَدَّمَتْ لِإِعَادٍ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ  
بِمَا تَعْمَلُونَ ۝

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Hasyr: 18).

Ayat tersebut menjelaskan bahwa anjuran untuk memperhatikan masa depan. Dalam hal ini investasi salah satu termasuk bekal hidup di dunia dan diakhirat. Asalkan investasi bertujuan untuk ibadah akan bernilai ibadah pula sehingga dianjurkan. Inpvestasi bisa dijadikan kegiatan untuk mempersiapkan masa depan.

Pada era sekarang ini tren dunia menunjukkan bahwa prinsip – prinsip yang dikembangkan dalam kegiatan ekonomi, termasuk kegiatan penanaman modal telah berjalan ke arah prinsip syariah yang mengacu pada hukum islam dan bersifat mendunia. Untuk mengikuti tren global tersebut indonesia juga harus mengarahkan aktivitas ekonominya berdasarkan prinsip-prinsip syariah dengan

---

<sup>21</sup> Sri Kartini, Konsumsi dan Investasi, (Semarang: Mutiara Aksara, 2019), h.35

mengangkat prinsip-prinsipnya ke dalam sistem hukum nasional.<sup>22</sup>

Hal ini senada dengan perkembangan global dimana kegiatan ekonomi mengarah pada prinsip-prinsip syariah, termasuk didalamnya kegiatan investasi di pasar modal, maka saat ini kegiatan pasar modal negara Indonesia dijalankan secara konvensional juga dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip agama islam. Beberapa instrumen investasi yang berlaku di pasar modal syariah adalah instrumen investasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah yaitu transaksinya yang bersifat thayyib, adil, halal, dan maslahat serta wajib terhindar dari unsur riba, maysir, dan gharar.<sup>23</sup>

Investasi mempunyai hubungan yang erat dengan kemajuan perekonomian suatu negara. Untuk menguatkan suatu pertumbuhan ekonomi sangat berkaitan erat dengan beberapa pembiayaan yang harus dilakukan. Pembangunan seharusnya ditopang dengan investasi baik investasi secara langsung ataupun investasi secara tidak langsung atau investasi portofolio. Baik investasi tersebut dilaksanakan oleh pemerintah maupun dilaksanakan oleh sektor swasta.<sup>24</sup>

Prinsip-prinsip dasar transaksi dalam keuangan syariah yang dijadikan panduan dalam berbagai aktivitas transaksi ekonomi adalah:<sup>25</sup>

---

<sup>22</sup> Iyah Faniyah, *Investasi Syariah dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017), h. 41

<sup>23</sup> Iyah Faniyah, *Investasi Syariah dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017), h. 42

<sup>24</sup> Iyah Faniyah, *Investasi Syariah dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017), h. 47

<sup>25</sup> Iyah Faniyah, *Investasi Syariah dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017), h.48

- a. Larangan riba.
- b. Larangan kegiatan ekonomi yang berunsur maysir, gharar, serta segala hal yang dilarang oleh Syariah agama islam.
- c. Perintah untuk mentapkan bagi hasil
- d. Perjanjian yang adil
- e. Mendorong produktivitas dan keadilan distribusi.

#### **b. Jenis-jenis Investasi**

Jenis-jenis investasi dikelompokkan menjadi dua kategori sebagaimana berikut ini:

- 1) Berdasarkan jenisnya dikelompokkan menjadi dua yakni investasi aktifa riil/langsung dan investasi aktifa finansial/ tidak langsung. Investasi aktifa riil/langsung mengacu pada asset atau faktor produksi. Contohnya emas, intan, perkebunan, rumah, dan sebagainya. Sedangkan investasi aktifa finansial/ tidak langsung berkaitan dengan asset keuangan seperti deposito, surat berharga dan sebagainya.<sup>26</sup>
- 2) Berdasarkan karakterustuknya dikelompokkan menjadi empat, sebagai berikut:
  - a. Investasi publik merupakan investasi oleh negara atau pemerintah untuk membangun sarana dan prasarana,

---

<sup>26</sup> Amalia Nuril Hidayati, Investasi: Analisis Dan Relevansinya Dengan Ekonomi Islam, *Malia: Jurnal Ekonomi Islam*, Volume 8, nomor 2, 2017.

- seperti pembangunan jalan tol dan sarana public lainnya.<sup>27</sup>
- b. Investasi swasta merupakan investasi yang dilakukan oleh swasta dengan tujuan untuk mendapatkan manfaat berupa laba. Seperti, usaha mikro atau rumah tangga, usaha kecil dan menengah, dan usaha besar.<sup>28</sup>
  - c. Kerjasama investasi pemerintah dan swasta yakni kerjasama antara pemerintah dan swasta dalam melakukan investasi untuk membangun prasarana dan sarana (infrastruktur) guna memenuhi kebutuhan masyarakat (publik). Proyek kerjasama ini dapat berupa pembangunan jalan tol, pasar, rumah sakit, dan sarana prasarana publik lainnya.<sup>29</sup>
  - d. Investasi kerjasama antar negara, misalnya negara ASEAN.<sup>30</sup>

Sebagaimana yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Kudus yang menggunakan investasi berdasarkan jenisnya yakni dengan investasi aktifa riil/langsung dan investasi aktiva finansial/ tidak langsung. Adapun

---

<sup>27</sup> Amalia Nuril Hidayati, Investasi: Analisis Dan Relevansinya Dengan Ekonomi Islam, *Malia: Jurnal Ekonomi Islam*, Volume 8, nomor 2, 2017.

<sup>28</sup> Amalia Nuril Hidayati, Investasi: Analisis Dan Relevansinya Dengan Ekonomi Islam, *Malia: Jurnal Ekonomi Islam*, Volume 8, nomor 2, 2017.

<sup>29</sup> Amalia Nuril Hidayati, Investasi: Analisis Dan Relevansinya Dengan Ekonomi Islam, *Malia: Jurnal Ekonomi Islam*, Volume 8, nomor 2, 2017.

<sup>30</sup> Amalia Nuril Hidayati, Investasi: Analisis Dan Relevansinya Dengan Ekonomi Islam, *Malia: Jurnal Ekonomi Islam*, Volume 8, nomor 2, 2017.

penerimaan kembali investasi berupa investasi non permanen (dana bergulir) dan investasi permanen (penyertaan modal ke Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)).<sup>31</sup>

### c. Masalah dalam Investasi

Sebagaimana dilansir salah satu media, disebutkan bahwa Presiden Joko Widodo sangat menyayangkan lambatnya proses penerbitan SIUP (Surat Ijin Usaha Perdagangan). Birokrasi yang tidak memudahkan masyarakat menjadi negara Indonesia berada pada posisi yang cukup terbelakang terkait menarik minat investor. Beberapa usaha lain juga menganggap lambatnya proses penerbitan SIUP serta kurangnya inovasi yang bisa menjangkau seluruh daerah di Indonesia. Beberapa permasalahan yang semacam ini belum sepenuhnya teratasi, khususnya keluhan yang berhubungan dengan biaya tinggi dan ketidakpastian hukum bagi pengusaha. Hal ini disebabkan tidak adanya inovasi orientasi pemerintahan daerah terhadap hubungan perizinan dengan pendapatan asli daerah (PAD), dan tarik menarik kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah. Setidaknya ada sepuluh permasalahan yang harus menjadi program percepatan penanaman modal di Indonesia, diantaranya:<sup>32</sup>

- 1) Perbaiki kebijakan, dan penerapan investasi
- 2) Beberapa permasalahan birokrasi

---

<sup>31</sup> Pemerintah Kabupaten Kudus, <https://kuduskab.go.id/p/197/laporan-transparansi-anggaran-2014-2021>

<sup>32</sup> Yusniah Angraini, Kebijakan Pengembangan Investasi Daerah, (Jakarta: Indocamp, 2018) h. 68-72.



- 3) Ketidak jelasan dalam penyajian dan penerapan otonomi daerah
- 4) Lemahnya sumber daya manusia dan lemahnya kebijakan ketenagakerjaan
- 5) Tingginya perilaku korupsi
- 6) Kurangnya insentif bidang pajak maupun non pajak
- 7) Lemahnya jaminan dan perlindungan investasi
- 8) Lemahnya penegakan dan kepastian hukum.
- 9) Lemahnya koordinasi antar kelembagaan
- 10) Permasalahan lain seperti stabilitas politik dan lainnya.

### **5. Produk Domestik Regional Bruto**

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebagaimana Case dan Fair merupakan nilai output pasar total suatu negara. PDRB yakni nilai pasar barang dan jasa yang didapatkan dalam waktu tertentu serta berdasarkan oleh faktor-faktor produksi tertentu.<sup>33</sup>

PDRB diartikan juga sebagai jumlah nilai tambah jasa dan barang yang diproduksi oleh beberapa produsen dalam daerah tertentu serta dalam periode waktu tertentu. Pendekatan PDRB terdiri dari 3 pendekatan, yaitu:<sup>34</sup>

- a. metode produksi (production approach)
- b. metode pendapatan (income approach)

---

<sup>33</sup> Idham Nur Iman, dkk. Pengaruh Jumlah Penduduk, PDRB dan Belanja Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Bandung Tahun 2000-2017, No.2 2019. h.389

<sup>34</sup> Idham Nur Iman, dkk. *Pengaruh Jumlah Penduduk, PDRB dan Belanja Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Bandung Tahun 2000-2017*, No.2 2019. h.389

- c. metode pengeluaran (expenditure approach).

Unit-unit produksi dikelompokkan dalam sembilan lapangan usaha (sektor) yaitu : pengangkutan dan komunikasi, Pertanian, industri pengolahan, hotel, pertambangan dan penggalian, perternakan, listrik, gas dan air bersih, konstruksi, perdagangan, restoran, keuangan, real estate dan jasa perusahaan, kehutanan dan perikanan jasa-jasa (termasuk jasa pemerintah)<sup>35</sup>

Secara pendekatan pendapatan PDRB adalah balas jasa yang diterima oleh mereka yang berpartisipasi dalam kegiatan produksi pada daerah tertentu, dalam jangka waktu tertentu. Balas jasa tersebut adalah gaji atau upah, penyewaan tanah, bunga dari suatu modal dan keuntungan; semuanya sebelum di potong pajak penghasilan dan pajak langsung.<sup>36</sup> Secara pendekatan pengeluaran PDRB adalah semua komponen permintaan akhir yang terdiri dari : Pengeluaran konsumsi lembaga swasta nirlaba serta rumah tangga, konsumsi suatu pemerintahan, pembentukan modal tetap domestik, perubahan inventori, ekspor neto (merupakan ekspor dikurangi impor).<sup>37</sup>

---

<sup>35</sup> Idham Nur Iman, dkk. *Pengaruh Jumlah Penduduk, PDRB dan Belanja Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Bandung Tahun 2000-2017*, No.2 2019. h.389

<sup>36</sup> Idham Nur Iman, dkk. *Pengaruh Jumlah Penduduk, PDRB dan Belanja Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Bandung Tahun 2000-2017*, No.2 2019. h.389

<sup>37</sup> Idham Nur Iman, dkk. *Pengaruh Jumlah Penduduk, PDRB dan Belanja Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Bandung Tahun 2000-2017*, No.2 2019. h.389

## B. Penelitian Terdahulu

Berikut ini dijelaskan mengenai penelitian relevan yang menjadi acuan serta kajian mengenai pengaruh jumlah penduduk, investasi, dan produk domestik regional bruto terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Kudus, diantaranya:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ariska Oktiani dan Novi Al Muhariah pada tahun 2021 dalam jurnal Ilmu Ekonomi dan Perencanaan Pembangunan yang berjudul “Pengaruh Jumlah Penduduk dan Inflasi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sumatera Selatan”.

Hasil pada penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa jumlah penduduk berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) sedangkan Inflasi menunjukkan pengaruh yang juga signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Sumatera Selatan. Hal tersebut memberikan dampak terhadap pendapatan asli daerah sebesar 97,70%. Sedangkan sisanya dipengaruhi oleh pendapatan lain. Adapun persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yakni berada pada variabel jumlah penduduk ( $X_1$ ) dan variabel pendapatan asli daerah ( $Y$ ). Selanjutnya terjadi perbedaan pula ditunjukkan pada variabel Inflasi ( $X_2$ ) dimana penelitian ini tidak menggunakan variabel tersebut, juga pada daerah yang ditelitinya.<sup>38</sup>

2. Penelitian yang dilakukan oleh Agus Indiranto Kurniawan, Theresia Militina, dan Rachmad Budi Suharto pada tahun 2017 dalam jurnal

---

<sup>38</sup> Ariska Oktiani dan Novi Al Muhariah, *Pengaruh Jumlah Penduduk dan Inflasi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sumatera Selatan*, *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Perencanaan Pembangunan* 1, no 1, 2021, h.33.

INOVASI yang berjudul “Pengaruh Investasi Swasta dan Pengeluaran Pemerintah Serta Tenaga Kerja terhadap Pendapatan Asli Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi”.

Hasil penelitian yang telah dilakukan bahwa investasi swasta, pengeluaran pemerintah, dan tenaga kerja berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten Kutai Barat. Meskipun dalam hal ini investasi swasta berpengaruh langsung namun tidak signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Kutai Barat. Hubungannya dengan penelitian ini bahwa terdapat persamaan mengenai variabel X dan Y yang digunakan yakni variabel investasi dan variabel pendapatan asli daerah. Sedangkan perbedaannya terletak pada variabel X yang lain yang tidak digunakan pada penelitian ini serta daerah yang diambil.<sup>39</sup>

3. Penelitian yang dilakukan oleh Syamsul Huda pada tahun 2020 dalam jurnal Ilmu Administrasi dan Manajemen yang berjudul “Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto dan Pajak Terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Pamekasan”.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa produk domestik regional bruto dan pajak daerah berpengaruh positif terhadap belanja daerah, dari pengujian hipotesis dinyatakan variabel produk domestik regional bruto berpengaruh secara nyata terhadap belanja daerah. pajak daerah berpengaruh positif nyata

---

<sup>39</sup> Agus Indiranto Kurniawan, Theresia Militina, dan Rachmad Budi Suharto, Pengaruh Investasi Swasta dan Pengeluaran Pemerintah Serta Tenaga Kerja terhadap Pendapatan Asli Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi, *INOVASI 13*, no 2, 2017, h.75.

terhadap belanja daerah. Adapu persamaan dengan penelitian ini yakni terdapat pada variabel X produk domestic bruto (PDRB). Perbedaannya terletak pada variabel X pajak daerah dan variabel Y belanja daerah serta lokasi penelitian.

Kemudian untuk lebih jelasnya disajikan secara lebih ringkas dan jelas dengan menggunakan tabel persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu.

**Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu**

No	Peneliti	Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Ariska Oktiani dan Novi Al Muhariah	2021	Pengaruh Jumlah Penduduk dan Inflasi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sumatera Selatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Variabel X Jumlah Penduduk</li> <li>• Variabel Y Pendapatan Asli Daerah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Variabel X Inflasi</li> <li>• Lokasi penelitian</li> </ul>
2	Agus Indiranto Kurniawan, Theresia Militina, dan Rachmad Budi Suharto	2017	Pengaruh Investasi Swasta dan Pengeluaran Pemerintah Serta Tenaga Kerja terhadap Pendapatan Asli Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Variabel X Investasi</li> <li>• Variabel Y Pendapatan Asli Daerah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Variabel X Pengeluaran pemerintah dan tenaga kerja</li> <li>• Variabel Y Pertumbuhan Ekonomi</li> <li>• Lokasi Penelitian</li> </ul>

No	Peneliti	Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
3	Syamsul Huda	2020	Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto dan Pajak Terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Pamekasan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Variabel X Produk Domestik Regional Bruto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Variabel X Pajak</li> <li>• Variabel Y Belanja Daerah</li> <li>• Lokasi Penelitian</li> </ul>

### C. Kerangka Berpikir

Pendapatan asli daerah merupakan sumber pembiayaan bsgi pemerintah daerah yang dihasilkan dari beberapa sumber penerimaan meliputi pajak daerah, retribusi daerah, serta hasil perusahaan milik daerah, sumbangan dari pemerintah, sumbangan lain yang diatur dalam peaturan perundang-undangan serta pendapatan lain yang sah. PAD bisa dikatakan sebagai tolok ukur suatu daerah guna pelaksanaan pembangunan daerah.

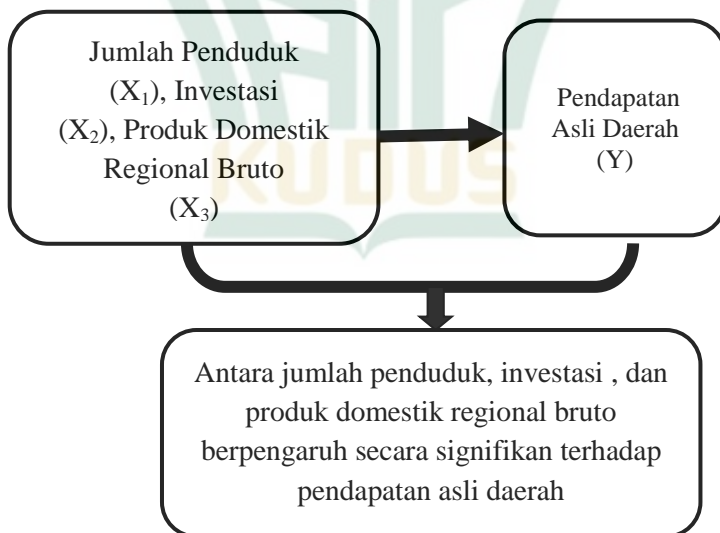
Tinggi atau rendahnya PAD dipengaruhi oleh peran perusahaan daerah yang merupakan sumber pendapatan daerah, perpajakan daerah, subsidi pemerintah, badan usaha milik daerah (BUMD), kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajiban terhadap pemerintah, serta peraturan-peraturan daerah juga mempengaruhi PAD. Semakin tinggi PAD juga mempengaruhi tingkat kemandirian suatu daerah.

Berhubungan dengan beberapa factor yang mempengaruhi tinggi atau rendahnya PAD tersebut, maka salah satu faktornya bisa dikatakan jumlah penduduk. Jumlah penduduk merupakan potensi yang dapat meningkatkan produksi. Semakin banyak penduduk, maka akan semakin banyak pula tenaga kerja juga tidak terlepas dari kesadaran penduduk

dalam melaksanakan kewajiban berupa pajak, redistribusi daerah dan lain-lain.

Selain itu juga berkaitan dengan faktor tinggi atau rendahnya PAD salah satunya yakni investasi. Dimana investasi dalam jangka panjang mampu bermanfaat bagi kegiatan ekonomi, social, dan lainnya dalam jangka waktu tertentu. Sehingga dalam hal ini investasi juga sebagai salah satu hal yang dipertimbangkan sebagai factor yang dapat mempengaruhi pendapatan asli daerah.

Faktor lain berkaitan dengan produk domestik regional bruto (PDRB). PDRB berkaitan dengan jumlah nilai tambah produksi barang dan jasa pada wilayah tertentu serta dalam jangka waktu tertentu. Hal ini juga merupakan factor yang memberikan pengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Dapat disimpulkan jika PDRB semakin tinggi maka penerimaan pemerintah juga semakin tinggi. Berdasarkan uraian di atas, asumsi dasar penelitian ini berdasarkan variabel berikut:



**Gambar 2.1 Kerangka berpikir**

**D. Hipotesis Penelitian**

Adapun hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini sebagai mana berikut:

1. Terdapat pengaruh yang signifikan antara jumlah penduduk dengan pendapatan asli daerah di Kabupaten Kudus.
2. Terdapat pengaruh yang signifikan antara investasi dengan pendapatan asli daerah di Kabupaten Kudus.
3. Terdapat pengaruh yang signifikan antara produk domestik regional bruto (PDRB) dengan pendapatan asli daerah di Kabupaten Kudus.

